

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Upaya penumbuhan dan pengembangan ekonomi pada era globalisasi telah menjadi fokus utama dalam kebijakan masing-masing negara. Negara-negara di dalam suatu kawasan bergabung membuat suatu kekuatan ekonomi, misalnya MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa), AFTA (*Asian Free Trade Agreement*), NAFTA (*North American Free Trade Agreement*), APEC (*Asia-Pacific Economic Community*) dan lain-lain, untuk melakukan perjanjian dan kesepakatan perdagangan yang bisa lebih memacu pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara. Negara-negara di dunia pun bergabung dalam WTO (*World Trade Organization*) yang telah melahirkan aturan main yang disepakati oleh 137 negara untuk memungkinkan perkembangan ekonomi yang melampaui lintas batas negara, meskipun ternyata aturan ini hanya menguntungkan 30 negara besar dan kuat ekonominya, seperti Amerika Utara (AS dan Kanada), Masyarakat Ekonomi Eropa, dan negara-negara Asia Timur (Jepang, Taiwan, Korea) (Moko, 2005, hlm. 2,6,7). Demikian pula dalam globalisasi ekonomi dunia, bangsa Indonesia akan ketinggalan dalam segala bidang. Tetapi karena alamnya kaya akan selalu dieksploitasi dan dikuras habis oleh negara-negara yang ekonominya kuat, sedangkan manusianya dibiarkan tetap miskin dan lemah. Tanpa adanya gerakan dan perubahan kultur ini, dikhawatirkan bangsa Indonesia semakin terpuruk lebih dalam lagi, baik dari segi ekonomi maupun banyaknya pengangguran yang bisa berkorelasi dengan meningkatnya masalah kriminalitas, kekerasan, pelacuran, perjudian, mabuk-mabukan (minuman keras), pengguna narkoba, maraknya premanisme, penipuan-penipuan dengan berbagai modus, depresi kesulitan ekonomi yang berakibat gila atau bunuh diri dan lain-lain.

Urgensi Penguatan Budaya Wirausaha untuk Meningkatkan Daya Saing Indonesia di Era MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan diberlakukan mulai Desember 2015. Budaya wirausaha yang belum kuat dikhawatirkan akan mempengaruhi kemampuan Indonesia untuk

memanfaatkan potensi pasar domestik yang sangat besar. Hal ini menjadi peringatan bahwa dalam MEA nanti penetrasi produk luar ke pasar dalam negeri akan semakin massif. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pemerintah harus mendorong agar kewirausahaan menjadi budaya baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai dengan pendidikan tinggi; meningkatkan anggaran penelitian dan pengembangan, serta menggalakkan pelatihan kewirausahaan (Prianto, 2015).

Pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia belum dapat bersaing dengan negara-negara lain. Hal ini didasarkan pada laporan pembangunan manusia tahun 2014 yang dirilis oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) yang menunjukkan posisi Indonesia tidak lebih baik daripada negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Dari laporan tersebut diketahui bahwa peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di posisi 108 dari 187 negara. Posisi Indonesia berada di bawah negara seperti Singapura (9), Brunei (30), Malaysia (62) dan Thailand (89). Negara-negara anggota ASEAN lainnya menempati peringkat lebih rendah, yaitu; Myanmar (150), Laos (139), Kamboja (136), Vietnam (121), dan Filipina (117). Indonesia hanya mendapatkan nilai IPM sebesar 0,684 atau sedikit mengalami peningkatan dari angka 0,681 pada tahun 2013. Berdasarkan laporan itu, Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Oleh karena itu, pemerintah dan warga negara membutuhkan komitmen bersama dengan satu tujuan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

Berdasarkan keterangan di atas, maka marilah kita telaah beberapa pertanyaan sederhana ini:

1. Dengan semakin bertambahnya penduduk Indonesia dan setiap tahun selalu diikuti bertambahnya angkatan kerja, terdapat sekitar 11 juta pengangguran di Indonesia, lebih dari 245 ribu di antaranya adalah lulusan sarjana, *Siapakah yang dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja?*
2. Dengan melimpahnya sumber daya alam di Indonesia berupa laut, hutan, sungai, dalam tanah dan lain-lain, *siapakah yang harus mengolah dan memanfaatkannya untuk tujuan ekonomi dan bisnis, demi kemakmuran bangsa Indonesia?*

3. Dengan semakin dibutuhkannya sumber-sumber dana APBN dan APBD bagi kelangsungan hidup negara, di antaranya untuk menggaji Pegawai Negeri-Sipil, Polri, TNI dan membayar utang-utang luar negeri, yang sebagian besar bersumber dari pajak, *dari mana diperoleh sebagian besar sumber-sumber dari pajak tersebut?*
4. Dengan semakin berkembangnya bermacam-macam teknologi di dunia, *siapakah yang mampu memanfaatkan teknologi tersebut untuk tujuan ekonomi dan bisnis bagi kemajuan industri berbasis teknologi di Indonesia?*
5. Kekuatan ekonomi suatu negara salah satunya dapat dilihat dari kemampuan mendapatkan cadangan devisa yang kuat, berupa kemampuan untuk menghasilkan produk-produk bertujuan ekspor. *Siapakah yang mampu berperan menghasilkan produk-produk tersebut ?*
6. Besarnya potensi wisata, keindahan alam, dan keragaman budaya Indonesia dapat diolah untuk mendatangkan wisatawan mancanegara yang akan menghasilkan devisa dan memutar roda ekonomi, serta demi terbukanya lapangan kerja. *Siapakah yang mampu mengembangkan dunia pariwisata tersebut?*
7. Dengan aneka ragam hasil kerajinan tangan atau budaya yang khas di setiap daerah di Indonesia yang dapat di kembangkan menjadi produk layak ekspor, *siapakah yang mampu mengembangkan kerajinan tangan tersebut untuk tujuan ekspor?*
8. Tanah Indonesia yang subur dan luas disertai keanekaragaman sumber hayati dapat dikembangkan menjadi industri pertanian dan kehutanan untuk menghasilkan produk-produk ekspor. *Siapakah yang mampu mengembangkannya?* (Moko, 2005, hlm. 4)

Jawaban dari delapan pertanyaan tersebut hanya satu, yaitu para *Entrepreneur*. Dengan banyaknya *entrepreneur*, dua indikator penting dalam suatu negara maju dan makmur secara ekonomi akan terpenuhi, yaitu rendahnya angka pengangguran dan tingginya devisa terutama dari hasil barang-barang ekspor yang dihasilkan.

Menurut Engkoswara (1999) kehidupan manusia Indonesia menjelang tahun 2020 akan semakin membaik dan dinamik. Untuk itu kualitas lulusan dituntut memiliki kemampuan kemandirian yang tangguh agar dapat menghadapi tantangan, ancaman, hambatan yang diakibatkan terjadinya perubahan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa tantangan yang terjadi pada era global adalah semakin menipisnya kualitas kemandirian manusia Indonesia. Krisis yang melanda Indonesia yang multidimensi mengakibatkan budaya bangsa semakin memudar, yaitu terjadinya degradasi moral spiritual, semangat berusaha dan bekerja yang semakin melemah, kreativitas yang semakin

mengerdil dan menjurus ke arah negatif. Melalui pengembangan individu diharapkan secara keseluruhan masyarakat akan mengalami “*self empowering*” untuk lebih kreatif dan inovatif. Kecenderungan terjadinya perubahan tidak dapat dihindari semua pihak, baik individu, kelompok masyarakat, bangsa, maupun Negara, sehingga dituntut untuk lebih memfokuskan diri pada penyusunan rencana strategik dengan visi yang jauh ke depan agar siap menghadapi setiap perubahan. Realita yang ada, banyak lulusan pendidikan yang tidak mampu mengisi lowongan pekerjaan karena ketidakcocokan antara kemampuan yang dimiliki dengan kemampuan yang dibutuhkan dunia kerja.

Berdasarkan pendapat Engkoswara di atas, dapat dikatakan bahwa generasi muda sangat penting mempunyai karakter mandiri. Generasi muda yang mandiri merupakan cerminan kualitas yang dimilikinya, karena dengan kemandirian manusia akan memiliki karakter yang tidak mudah menyerah dan akan selalu konsisten terhadap segala keputusan yang telah diambil. Sejalan dengan hal ini Sumahamijaya (2003, hlm. 9) menyatakan bahwa:

Ciri-ciri sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul adalah berkarakter mandiri, berwatak kerja keras, tekun belajar dan menghargai waktu, pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, selalu proaktif dalam mencari dan menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi, menghadapi masa depan yang penuh dengan persaingan sangatlah diperlukan SDM yang berkualitas unggul supaya dapat bertahan dan bersaing di masa mendatang.

Pemikiran tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa untuk menghadapi kehidupan di masa sekarang dan masa yang akan datang dan demi terbentuknya generasi yang mampu berdaya saing dalam era globalisasi ini, maka dibutuhkan generasi yang berkarakter mandiri, kreatif, bertanggungjawab, berani melakukan perubahan, proaktif, selalu memiliki solusi dalam mengentaskan semua permasalahan yang dihadapinya baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bangsa dan Negara.

Pembangunan pendidikan nasional ditujukan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia khususnya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga akan menjadi bangsa yang beradab dan dapat

bersaing di dunia internasional. Berkaitan dengan cita-cita pendidikan nasional telah dijelaskan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional yang dinyatakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Foskett and Lumby (2003) (dalam Suharsaputra, 2010, hlm. 1) menyatakan *Education is a global-scale enterprise. The provision of school-based education is a firmly established component of the social and political landscape of every state across the world.* Pendidikan telah menjadi usaha yang berskala global terutama yang berkaitan dengan sekolah, yang penyediaannya telah menjadi unsur penting dalam lanskap politik dan sosial di semua negara di dunia. Ini bermakna bahwa konsern terhadap pendidikan (sekolah) menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia di dunia dalam membangun mutu hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu berbagai upaya perlu terus dilakukan dalam membenahi pendidikan baik dalam sistem ataupun manajerial agar mampu bertahan dalam menghadapi perkembangan globalisasi serta perubahan yang cepat dalam berbagai bidang kehidupan. Penciptaan budaya sekolah sangat mendukung karakter peserta didik. Tingkat keberhasilan penerapan pendidikan karakter ditentukan oleh terciptanya atmosfer sekolah yang mendorong pembentukan karakter yang diinginkan. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan karakter merupakan tanggung jawab bersama semua sivitas akademika suatu lembaga pendidikan (Bambang, hlm. 3)

Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting bagi kemajuan suatu negara, termasuk Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia sendiri terus mengalami suatu perbaikan demi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini tentu saja dilakukan demi terwujudnya mimpi Indonesia untuk memiliki generasi penerus bangsa berkualitas yang menjadi

pembangun masa depan negeri ini. Sistem pendidikan Indonesia sendiri dapat dikatakan sebagai sistem pendidikan yang begitu mendewakan kemampuan *hard skill* atau yang sifatnya akademis. Hampir seluruh sekolah di penjuru negeri ini memiliki materi pelajaran yang sama yang diajarkan di kelas yaitu materi yang sifatnya akademis dan sedikit sekali materi yang sifatnya *soft skill* atau mengembangkan minat dan bakat ataupun kemampuan dan ketrampilan dari siswa, rata-rata materi pelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah-sekolah setiap hari dapat dikatakan hanya menggempur otak di bagian kiri yang berkaitan dengan akademis, sedangkan otak bagian kanan yang menghasilkan ide-ide kreatif harus tertidur lesu.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang berperan penting terhadap pembinaan kedisiplinan siswa di sekolah bertanggung jawab terhadap pembinaan watak dan karakter siswa terutama dalam membentuk warga negara yang baik (*to be good citizenship*), yang memiliki intelegensi tinggi dan berakhlak mulia. Menghadapi era globalisasi Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya mengembangkan kompetensi kewarganegaraan (*Civic Competences*) siswanya, aspek-aspek *civic competences* tersebut diantaranya meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) yang dapat menumbuhkan karakter warga negara yang baik. Komponen watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi sosial (*civil society*).

Winataputra (2012, hlm. 73) mengungkapkan “*PKn dalam pengertian sebagai citizenship education didesain untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik (smart and good citizen) untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan*”. Konsep *smart and good citizen* tersebut berkesesuaian dengan amanat tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam alinea keempat

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang “... *Mencerdaskan kehidupan bangsa*”. Winataputra (2015) menjelaskan bahwa secara sosio-politik dan kultural, PKn memiliki visi pendidikan yakni “*mencerdaskan kehidupan bangsa*”. Maksud dari “*mencerdaskan kehidupan bangsa*” yakni menumbuhkembangkan kecerdasan kewarganegaraan yang merupakan prasarat untuk pembangunan demokrasi dalam arti luas, yang mempersyaratkan terwujudnya budaya kewarganegaraan sebagai salah satu diterminan tumbuh-kembangnya negara demokrasi.

Dari pemahaman tersebut diturunkan fungsi PKn sebagai wahana sistemik pencerdasan kehidupan bangsa (Winataputra, 2015). Wahab dan Sapriya (2011) menjelaskan bahwa PKn secara khusus termaktub dalam UU Sisdiknas Pasal 37 yang berbunyi: “..... *PKn dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air*”. Winataputra (2015) selanjutnya menyebut PKn berkaitan dengan pendidikan nasional yang merupakan wahana sistemik pencerdasan kehidupan bangsa yang dijalankan melalui praksis PKn yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan watak kewarganegaraan (*civic dispositions*). Dari ketiga kluster kemampuan tersebut yang menjadikan warga negara yang ideal dan demokratis dalam mengambil keputusan secara cerdas dan bernalar (*reasoned decision maker*). Ketiga kluster kemampuan tersebut juga harus saling berpenetrasi, sehingga akan menghasilkan warga negara yang berkompeten, berkeyakinan diri, dan berkomitmen untuk berbakti dan mengabdikan diri.

Pada saat ini *entrepreneurship* menjadi tema besar yang menarik untuk diperbincangkan, bukan saja dalam ranah ekonomi, melainkan pada setiap ranah kehidupan; sosial, kesehatan, politik, pemerintahan, bahkan pendidikan. Untuk perbincangan pada ranah terakhir, tentunya *entrepreneurship* akan bersinggungan dengan sub-sub tema yang antara lain berkaitan dengan pendidik, peserta didik, proses pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Dengan kata lain, tema pendidikan adalah tema yang berkaitan dengan peran pendidik yang membantu peserta didiknya agar bakat dan potensinya berkembang optimal, sehingga lahir sumber daya manusia menjadi lebih baik.

Entrepreneurship yang dijadikan sebagai salah satu kompetensi yang harus dicapai dalam Standar Kompetensi Lulusan, telah teruji mengandung nilai-nilai kebaikan yang sepatutnya dimiliki peserta didik. Nilai-nilai kebaikan yang terkandung yaitu mempunyai visi dan misi, kreatif dan inovatif, berani menanggung resiko, berjiwa kompetisi, mampu melihat dan menciptakan peluang, cepat tanggap dan gerak cepat, berjiwa sosial dan menjadi dermawan (Gina, 2009, hlm. 5).

Menurut Soeparman Spemahamidjaja *entrepreneur* adalah suatu kemampuan (*ability*) dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak tujuan, siasat kiat dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Sekolah memerlukan sebuah sistem penyelenggaraan dan pembelajaran yang menyiapkan siswa ke arah kemandirian untuk berkreasi dan berinovasi. Belajar yang menekankan pada proses untuk “menghasilkan”, bukan sekedar pada proses untuk “memahami”. Secara umum pendidikan mempunyai dua tugas besar. Pertama; menyiapkan generasi yang mempunyai kemampuan adaptasi terhadap ekspektasi. Kedua; menyiapkan agar mereka mampu mengatasi masalah-masalah yang ditemukan dengan cara-cara baru. Melalui yang pertama siswa dapat belajar untuk memahami kondisi dan pola yang ada di sekitar mereka. Sedangkan yang kedua mendorong siswa untuk berinovasi. Dua fungsi tersebut harus dioperasionalkan secara seimbang. Pengembangan pendidikan melalui model *entrepreneur* menjadi alternatif yang sesuai dengan dua fungsi pendidikan tersebut karena sangat menekankan pada pembentukan perilaku mencipta dan berinovasi.

Menteri Koperasi dan UKM, Syarif Hasan mengatakan sebuah negara maju ialah negara yang memiliki 2 persen wirausaha dari jumlah penduduk. Saat ini Indonesia hanya memiliki 1,56 persen wirausaha dari total penduduknya. David C Mclelland dalam bukunya *The Achieving Society*, mengatakan bahwa paling tidak dibutuhkan 2 persen pengusaha dari total jumlah penduduk agar sebuah negara menjadi makmur dan sejahtera. Jika mengacu pada perhitungan tersebut, berarti dari total 250 juta penduduk Indonesia, minimal harus ada 5 juta pengusaha untuk membangun negara ini

dalam bidang ekonomi. Sebagai perbandingan, jumlah pengusaha di Singapura 10 persen, Jepang 15 persen, China 16 persen dan Amerika Serikat 18 persen dari total penduduknya.

Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan data tentang jumlah pengusaha Indonesia di tahun 2015 yang mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Saat ini, total pengusaha di Indonesia berada di kisaran angka 1,5 persen (3,75 juta). Angka ini akan terus tumbuh hingga mencapai 5 persen dalam kisaran waktu 5-10 tahun. Syaratnya, Indonesia bisa menaikkan tingkatan *ease of doing business* (kemudahan melakukan bisnis) ke level 50 besar dunia. Sistem pendidikan di Indonesia tidak mengajarkan kreativitas dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan dengan baik. Kampus-kampus lebih banyak menciptakan para pencari kerja dibanding pembuat lapangan kerja. Setiap tahun, jumlah orang yang berbaris untuk mendapat pekerjaan selalu bertambah dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan kendala-kendala/permasalahan yang telah diuraikan diatas, perlu adanya perubahan pola pikir yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan karakter kemandirian dan Jiwa Kewirausahaan peserta didik. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti tertarik meneliti permasalahan yang berjudul **“Penumbuhan Karakter Kewirausahaan Peserta Didik Dalam Meningkatkan Civic Disposition Melalui Sekolah Berbasis Entrepreneurship”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengelompokkan beberapa masalah yang ingin diteliti dalam penyusunan tesis ini. Adapun permasalahan yang ingin diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Realita permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti: disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila; keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila; bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa.

2. Salah satu kelemahan dalam bidang pendidikan di Indonesia saat ini, pendidikan hanya mengedepankan penguasaan aspek keilmuan dan kecerdasan sedangkan materi yang sifatnya *soft skill* atau mengembangkan minat dan bakat ataupun kemampuan dan ketrampilan dari siswa diabaikan
3. Sekolah memerlukan sebuah sistem penyelenggaraan dan pembelajaran yang menyiapkan siswa ke arah Kemandirian untuk Berkreasi dan Berinovasi agar dapat meningkatkan *Civic Disposition* warga negara (khususnya peserta didik). Belajar yang menekankan pada proses untuk menghasilkan, bukan sekedar pada proses untuk memahami. Proses pembelajaran selama ini mengarahkan siswa untuk “berhenti” di proses memahami.
4. Pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang secara langsung (*eksplisit*) mengenalkan nilai dan moral, dan sampai taraf tertentu menjadikan peserta didik peduli dan menginternalisasi nilai-nilai.
5. Pendidikan kewarganegaraan menerima sumber-sumber pengetahuan lainnya untuk memperkaya, sehingga perlunya proses pengintegrasian unsur-unsur dari pengetahuan dalam pendidikan kewarganegaraan.
6. Perlunya pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang mempunyai arti bagi para siswa dalam menanggapi masalah-masalah kemasyarakatan dan kenegaraan.
7. Seperti apa upaya dan management sekolah dalam membangun jiwa kewirausahaan (kemandirian dan kreativitas) peserta didik.

1.3 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian dan penjelasan pada indentifikasi masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penumbuhan jiwa kewirausahaan peserta didik di sekolah berbasis *entrepreneurship*?
2. Bagaimana membangun karakter kemandirian dan kreativitas peserta didik dalam meningkatkan *Civic Disposition* melalui sekolah berbasis *entrepreneurship*?
3. Bagaimana manajemen sekolah dalam membangun karakter kemandirian dan kreativitas peserta didik melalui sekolah berbasis *entrepreneurship*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana menumbuhkan karakter kewirausahaan peserta didik melalui sekolah berbasis *entrepreneurship*, dengan menggunakan pendekatan tersebut dalam rangka meningkatkan *Civic Disposition* peserta didik. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana penumbuhan jiwa kewirausahaan peserta didik di sekolah berbasis *entrepreneurship*
2. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana membangun karakter kemandirian dan kreativitas peserta didik dalam meningkatkan *Civic Disposition* melalui sekolah berbasis *Entrepreneurship*
3. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana manajemen sekolah berbasis *entrepreneurship* dalam membangun karakter kemandirian dan kreativitas peserta didik

1.5 Paradigma Penelitian

Dalam metodologi penelitian, paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang di dalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu). Capra (1996) mendefinisikan paradigma sebagai ‘konstelasi konsep, nilai-nilai persepsi dan praktek yang dialami bersama oleh masyarakat, yang membentuk visi khusus tentang realitas sebagai dasar tentang cara mengorganisasi dirinya’. (Moleong, 2010, hlm. 49) dari dua paradigma yang sering digunakan (*naturalistic* atau kualitatif dan *positivisme* atau kuantitatif), penelitian ini menggunakan paradigma penelitian *naturalistic* atau kualitatif.

Dengan demikian penelitian ini mengacu pada paradigma kualitatif yang dirinci oleh Lincoln and Guba (dalam Alwasilah, 2009, hlm. 78-79) sebagai berikut:

1. Latar tempat dan waktu penelitian yang alamiah
2. Manusia atau peneliti sendiri sebagai instrumen pengumpul data primer
3. Penggunaan pengetahuan yang tidak eksplisit
4. Metode kualitatif

5. Pemilihan sampel penelitian secara *purposive*
6. Analisis data secara induktif atau *bottom up*
7. Teori dari dasar yang dilandaskan pada data secara terus menerus
8. Cetak biru penelitian mencuat dengan sendirinya
9. Hasil penelitian yang disepakati oleh peneliti dan responden
10. Cara pelaporan penelitian gaya studi kasus
11. Tafsir idiografik atau kontekstual
12. Penerapan tentatif dari hasil penelitian
13. Batasan dan cakupan penelitian ditentukan oleh fokus penelitian, dan
14. Mengikuti kriteria khusus untuk menentukan keterpercayaan dan mutu penelitian.

Penelitian ini berangkat dari pendapat Branson (1999, hlm. 8), bahwa *Civic Education* mempunyai tiga komponen utama: pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*Civic Skills*), dan watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*). Komponen mendasar ketiga dari *Civic Education* adalah watak-watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan bagi demokrasi konstitusional. Watak-watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civil society*. Pengalaman-pengalaman demikian hendaknya membangkitkan pemahaman bahwasannya demokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan mandiri yang bertanggungjawab dari tiap individu. Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan dengan sukses.

Penelitian ini berlatar jiwa *entrepreneurship*, dimana objek kajian utamanya yaitu nilai-nilai kewirausahaan yang ditanamkan pada peserta didik di SMP Santa Ursula Bandung melalui kegiatan *creative hours*. Oleh karena itu alur pikir penelitian ini secara paradigmatik dapat digambarkan dalam bentuk seperti **Bagan 1** di bawah ini:

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat baik dari segi teori, segi kebijakan, segi praktik maupun dari segi isu serta aksi sosial.

1. Dari segi teori, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a) Guna memberi sumbangan secara konseptual mengenai bagaimana penumbuhan jiwa kewirausahaan peserta didik dalam meningkatkan *civic disposition* melalui sekolah berbasis *entrepreneurship*
- b) Mendorong tema-tema baru penelitian, khususnya penelitian tentang penumbuhan jiwa kewirausahaan peserta didik.
- c) Melengkapi hasil penelitian yang sebelumnya sehingga dapat memperkaya dan memperkuat khasanah keilmuan PKn.

2. Dari segi kebijakan, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a) Sebagai bahan evaluasi dalam pembelajaran khususnya bagi pihak dinas pendidikan setempat dalam pengembangan mata pelajaran PKn.
- b) Adanya strategi membangun jiwa kewirausahaan peserta didik dalam meningkatkan *civic disposition*. Hal ini memungkinkan pihak sekolah (Kepala sekolah dan guru PKn) untuk meningkatkan kreativitas peserta didik yang terkait dengan Pendidikan Karakter atau pembelajaran PKn.

3. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat:

- a) Bagi sekolah, khususnya SMP Santa Ursula Bandung dapat menjadi masukan dalam melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran khususnya mengenai penerapan jiwa kewirausahaan peserta didik dalam mata pelajaran PKn dan bidang studi lainnya.
- b) Bagi sekolah lain, dapat menjadikan ini sebagai bahan inspirasi dalam proses membangun karakter pada mata pelajaran PKn maupun bidang studi lainnya.
- c) Sebagai salah satu rujukan bagi guru dan pihak terkait mengenai karakter kemandirian dan jiwa kewirausahaan agar dapat berpikir kreatif dan inovatif yang sesuai dengan kondisi sekolah yang bersangkutan.

4. Dari segi isu/aksi sosial, penelitian ini diharapkan dapat:

Sebagai bahan evaluasi pembelajaran oleh kepala sekolah dan guru khususnya mata pelajaran PKn dan mata pelajaran yang lain bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang menyiapkan siswa ke arah kemandirian untuk berkreasi dan berinovasi. Belajar yang menekankan pada proses untuk “menghasilkan”, bukan sekedar pada proses untuk “memahami”. siswa harus diberi dorongan dan bekal dalam pembelajaran yang mempunyai *mindset* berkreasi dan berinovasi berdasarkan ilmu yang telah dimiliki. Jadi, pembelajaran di sini tidak hanya diperoleh di dalam kelas melainkan peserta didik mengalaminya sendiri.

1.7 Definisi Istilah

1. Pengertian Jiwa Kewirausahaan

Raymond W.Y Kao menyebut bahwa “kewirausahaan” (*jiwa entrepreneurship*) sebagai suatu proses, yakni proses penciptaan sesuatu yang baru (kreasi baru) dan membuat sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada (inovasi)” (dalam Lupiyoadi, 2007:4).

2. Sekolah Berbasis *Entrepreneurship*

Sekolah Berbasis *entrepreneur* adalah satu konsep pendidikan yang memberikan semangat pada peserta didik untuk kreatif dan inovatif dalam mengerjakan sesuatu hal. Pola pendidikan sedemikian ini menuntut peserta didik untuk bisa produktif. Pendidikan *entrepreneur* adalah sebuah pendidikan yang mengarahkan dan membekali peserta didik untuk bisa cepat dalam merespon perubahan dan memahami kebutuhan sosial ekonomi masyarakat

3. Karakter Kemandirian

Desmita (2009, hlm. 185) menyatakan bahwa kemandirian mengandung beberapa pengertian, yaitu:

1. Suatu kondisi dimana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya sendiri.
2. Mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

3. Memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya.
4. Bertanggungjawab atas apa yang dilakukan.

4. Kreativitas

Kreativitas adalah kemampuan menghasilkan bentuk baru dalam seni, atau dalam permesinan, atau dalam memecahkan masalah-masalah dengan metode-metode baru (Chaplin, 1989).

5. Civic Disposition

Kalidjernih (2010, hlm. 20) mengemukakan bahwa “*civic disposition* merupakan istilah dalam pendidikan kewarganegaraan yang merujuk pada watak atau karakter (*disposition*) dan komitmen yang diperlukan untuk memelihara dan memajukan kewarganegaraan dan pemerintahan”.

6. Manajemen Sekolah

Manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model manajemen sekolah yang memberikan otonomi kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan langsung semua warga sekolah dan masyarakat (*stake holder*) yang dilayani, dengan tetap selaras dengan kebijakan nasional tentang pendidikan Bedjo Sujanto (2007).

1.8 Struktur Organisasi Tesis

Tesis yang akan ditulis terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, merupakan rasional yang menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan. Isi dari bab ini meliputi; a) Latar belakang masalah, b) Identifikasi masalah, c) Rumusan masalah, d) Tujuan penelitian, e) Paradigma Penelitian, f) Manfaat penelitian, g) Definisi Istilah, h) Struktur organisasi tesis.
- Bab II Kajian Pustaka, merupakan gambaran berbagai konsep, generalisasi dan teori yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian. Isi dari bab ini meliputi; a) PKn Sebagai Pendidikan Karakter, b) Jiwa Kewirausahaan, c) Strategi Pembelajaran PKn Berbasis *Entrepreneurship*, d) Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), e) Penelitian terdahulu.

- Bab III Metodologi Penelitian, merupakan penjelasan yang rinci mengenai metode penelitian yang digunakan. Isi dari bab ini meliputi; a) Desain penelitian, b) Subyek dan Lokasi Penelitian, c), Teknik Pengumpulan Data, d) Teknik Analisis Data, e) Keabsahan Data, f) Isu Etik.
- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan gambaran yang diperoleh dari lapangan untuk kemudian dianalisis menggunakan berbagai teori yang relevan. Isi dari bab ini meliputi; a) Gambaran Umum Lokasi Penelitian, b) Deskripsi Hasil Temuan Penelitian, c) Pembahasan Hasil Temuan.
- Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, merupakan jawaban dari aspek yang diteliti. Bab ini terdiri dari simpulan, Implikasi dan Rekomendasi.